

Negara Pasundan 1947- 1950 : gejolak menak Sunda menuju integrasi nasional

Agus Mulyana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=80421&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Menak merupakan satu kelompok elite dalam masyarakat di Jawa Barat sebagaimana halnya priyayi di Jawa pada umumnya. Sistem budaya menak berbeda dengan priyayi Jawa Sebagai mana katagori dari teori Clifford Geertz. Dalam sistem budaya menak terdapat unsure pola perilaku santri. Seperti halnya Wiranatakoesumah menunaikan ibadah haji. Achmad Djajadiningrat, semasa kecilnya mengikuti pendidikan pesantren.

Runtuhnya kerajaan sunda kuno (pajajaran), sulit untuk menelusuri mana yang menjadi pusat budaya menak sunda. Kerajaan (keraton) dapat berfungsi sebagai intitusi yang menjadi pusat budaya, bahkan dapat pula menjadi "kiblat" politik dari menak itu sendiri, seperti halnya kerajaan mataram di jawa. pusat kekuasaan meak di jawa barat. terpecah-pecah dalam bentuk kabupaten-kabupaten, yang biasanya tiap kabupaten dikuasi oleh satu keluarga bupati tertentu.

pada awal abad ke-20terjadi transfomasi sosial yang dilakukan oelh pemerintah kolonial belanda terhadap kelompok menak melalui institusi pendidikan. transformasi ini melahirkan differensiasi pada kelompok menak, yang melahirkan dua kelompok menak yaitu menak pangreh dan menak nasionalis. Menak pangreh praja adalah mereka yang dididik oleh pemerintah kolonial belanja, yang kemudian ditarik menjadi pegawai birokrasi pemerintah, sedangkan menak nasionalis. menah pangreh praja adalah mereka yang dididik oleh penerintah kolonial belanda, yang kemudian ditarik menjadi pegawai birokrasi pemerintah. sedangkan menak nasionalis, setelah mengikuti pendidikan mereka tidak menjadi pegawai birokrasi pemerintah. manak nasionalis lebih banyak terlibat pada organisasi pergerakan nasional.

Transformasi terjadi pula dalam struktur pemerintah kaum pribumi, yaitu dari model pemerintah yang tradisional menjadi moderen. Pada mulanya bupati merupakan penguasa tunggal. kemudian pemerintah kolonial belanda menerapkan undang-undang desentralisasi. undang-undang ini melahirkan dewan-dewan lokal. menak nasional banyak yangmasuk menjadi anggota dewan lokal. Dengan demikian bupati tidak lagi menjadi penguasa tunggal sebagaimana lazimnya pemerintah tradisional. Keterlibatan dewan lokal dalam merumuskan kebijakan pemerintah mencerminkan adanya keterlibatan rakyat dalam pemerintah, yang merupakan ciri dari suatu pemerintah modern.

Pada awal kemerdekaan, pemimpin nasionalis tampil menjadi pemimpin negara republik indonesia yaitu dengan terpilihnya soekarno dan hatta sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia. sementara itu di awal kemerdekaan ini timbul gejolak-gejolak sosial yang menghendaki tumbangnya kekuasaan lama yang dinilai sebagai representasi kekuatan kolonial. Di jawa barat timbul gejolak yang melawan arus utama

revolusi sosial seperti di kerawang, tangerang, banten dan Cirebon. Dalam revolusi sosial ini yang menjadi sasaran kemarahan rakyat adalah para pangeran raja yang masih berkuasa dan dinilai sebagai sisa-sisa kekuasaan kolonial. Kondisi seperti ini merupakan arus utama revolusi Indonesia.

Di Jawa Barat timbul gejolak yang melawan arus utama revolusi atau timbul gerakan kontra-revolusi. Gerakan ini dapat dijelaskan dengan teori dari Charles Tilly yang mengatakan bahwa gejolak akan timbul apabila "hal-hal tradisional" yang mapan tergusur. Gerakan kontra-revolusi ini dipimpin oleh seorang menak pangeran praja, mantan bupati Garut yaitu Soeria Kartalegawa dengan memproklamkan berdirinya negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Soeria Kartalegawa sebagai orang Sunda dan pangeran praja. "hak tradisionalnya" tergusur dengan pengangkatan Gubernur Jawa Barat yang bukan Sunda yaitu Soetardjo dan Datuk Jamin. Proklamasi negara Pasundan merupakan reaksi atas pengangkatan kedua Gubernur tersebut yang bukan orang Sunda.

Gagalnya gerakan Kartalegawa ini menyadarkan Belanda bahwa Kartalegawa bukanlah figur yang berpengaruh. Untuk melaksanakan politik federalnya, Belanda memotori diadakannya konferensi Jawa Barat yang bertujuan ingin mendirikan satu negara bagian di Jawa Barat. Dalam konferensi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Konferensi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat Jawa Barat, menak-menak nasionalis ikut terlibat pula dalam konferensi Jawa Barat. Pada tanggal 26 Februari 1948 berdirilah negara Pasundan, yang merupakan hasil konferensi Jawa Barat.

Didalam negara Pasundan hasil konferensi Jawa Barat, baik kelompok menak pangeran praja maupun menak nasionalis ikut terlibat. Bahkan menak nasionalis yang sikap politiknya repuliken banyak menendahkan roda pemerintahan negara Pasundan.

Jalannya roda pemerintahan negara Pasundan yang kedua ini, banyak mendapat tekanan-tekanan dari Belanda. Agresi militer II dinilai oleh para menak sebagai pelanggaran terhadap konsepsi dari negara federal yang menghendaki kebebasan. Adil Purediredja mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri negara Pasundan, sebagai sikap protes atas agresi militer Belanda tersebut. Bahkan Belanda mengancam akan melakukan penangkapan terhadap menak-menak di negara Pasundan yang garis politiknya bertentangan dengan Belanda. Sikap Belanda ini semakin memperkuat menak-menak untuk melakukan integrasi dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 1950, Wiranatakoesoema dihadapan sidang parlemen negara Pasundan menyatakan niatnya untuk menyerahkan mandatnya kepada parlemen Pasundan. Pada tanggal 8 Maret 1950 secara resmi negara Pasundan dibubarkan dan berintegrasi dengan RI. Dengan demikian negara Pasundan kedua ini merupakan instrumen bagi menak untuk melakukan integrasi nasional.